

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)

Anak Agung Putu Agung Wahyu Pratama⁽¹⁾

Putu Cita Ayu⁽²⁾

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: agungwahyu250101@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate and analyze how regional financial oversight, accountability, and budgetary participation affect the performance of local government. The research focuses on civil servants who work in 30 regional apparatus organizations located in Tabanan Regency. The study involved 177 individuals, and data was collected using a questionnaire. The sampling method utilized in this study was purposive sampling, while the analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of the study indicated that regional financial oversight did not affect the performance of local government in Tabanan Regency's regional apparatus organization. However, accountability and budgetary participation had a significant and positive impact on local government performance.

Keywords: Regional Financial Supervision, Accountability, Participation in Budgeting and Regional Government Performance

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah sebuah kelompok orang atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola kewenangan, memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan serta pembangunan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah bertugas mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, ditunjukkan agar dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengaruh dan peran masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, mengikuti prinsip demokrasi dan keadilan, persamaan, keistimewaan. dan ciri khas daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kinerja pemerintah daerah yang baik merupakan kinerja yang dapat diukur dengan beberapa indikator, yang pertama, dengan mengukur Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kemudian yang kedua, dengan bebas KKN (*Free Corruption*) diukur menggunakan indeks persepsi korupsi dan integritas, serta akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) diukur melalui nilai pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dilansir dari (Biizaa.com, 2022).

Dikutip dari (Kompas.Id, 2022) terdapat tiga kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik 2021 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, yakni Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun walaupun beberapa Kabupaten di Bali memperoleh predikat tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus-kasus negatif seperti pada kasus ini merujuk kepada kinerja pemerintah daerah yang melakukan tindakan suap (korupsi) terhadap Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Tabanan yang terungkap pada tahun 2022. Dikutip dalam (Tribunnews.com, 2022) yaitu tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan dan telah menjadwalkan terkait pemeriksaan kepada Prasetyo selaku Ketua/Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), terkait posisinya menjadi saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap terhadap pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Tabanan, Bali. Tahun Anggaran 2018 dan beberapa orang yang menjadi tersangka dalam hal tersebut. Kasus ini tidak hanya pada lingkup itu saja namun melebar luas juga seperti yang dikutip dalam (Tribun-Bali.com, 2022) yaitu sebanyak 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tabanan juga menerima dana dari DID tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)”**. Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk mengetahui apakah Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? 2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? 3. Untuk mengetahui apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan? Manfaat Penelitian ini: 1. Manfaat secara teoritis yaitu, dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi landasan pemikiran maupun referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai seputar Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang tersedia bagi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) dan dapat berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa/i yang membutuhkan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. 2. Manfaat secara praktisnya yaitu, dalam hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan maupun sumber informasi alternatif bagi setiap Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan kinerja individu maupun dalam organisasi pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori inti pada penelitian ini ialah teori *stewardship*. Teori *stewardship* menurut (Donaldson and Davis, 1991) suatu keadaan bahwa manager mereka memiliki kepentingan pribadi, tetapi mereka menganggap penting untuk menjadi orang utama. Pada dasarnya manusia bertindak bertanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan apa adanya. Teori *stewardship* ini menerangkan hubungan erat baik dari kinerja organisasi dengan keberhasilan organisasi, hingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi tujuan, misi dan visi organisasi. (Sari, 2018) Kinerja merujuk pada hasil yang dihasilkan dari interaksi antara kemampuan individu dan sikap individu terhadap pekerjaan dan organisasi.

Pengawasan keuangan daerah menurut (Kuswandi, 2016) merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sedemikian rupa agar pengeluaran-pengeluaran daerah memang dimanfaatkan sebagaimana dengan sasaran yang ditetapkan, sedangkan disisi lain supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat diserahkan pada kas daerah dengan waktu yang telah ditentukan, dan jumlah yang telah ditentukan dapat terlaksana untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah. Alatas *et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan.

Mokalu *et al.*, (2018). Menyatakan akuntabilitas mempunyai dua definisi, baik pada lingkup besar dan lingkup kecil. Pada lingkup besar, dalam hal akuntabilitas, pemegang amanah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi mengenai seluruh kegiatan yang dilakukannya, sebagai bagian dari kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Pada lingkup kecil, yakni akuntabilitas adalah suatu wujud tanggung jawab yang mengarah terhadap siapa dan organisasi bertanggung jawab untuk apa.

Menurut Rahayu, *et al.*, (2014), Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu bentuk keikutsertaan pegawai dan pejabat pemerintah didalam suatu organisasi pemerintahan agar berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan pada suatu capaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan pada anggaran organisasinya.

Hipotesis dalam penelitian ini:

Pengawasan keuangan daerah menurut *Alatas et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Penelitian ini merujuk pada *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *Sedarmayanti*, Akuntabilitas merupakan keharusan dalam memberikan pertanggung jawaban baik menjawab dan menjelaskan tindakan serta kegiatan individu atau suatu badan atau lembaga memberikan keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memintanya. Penelitian ini merujuk pada, *Putra & Indraswarawati* (2021), *Wiguna et al.*, (2015), *Jatmiko* (2020), *Elkha & Wahidahwati* (2020), serta *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran menurut (*Nurcahyani*, 2010) adalah salah satu bentuk proses keterlibatan orang-orang secara langsung yang mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran yang kinerjanya dievaluasi dan kemungkinan besar akan diberi imbalan berdasarkan pencapaian tujuan anggaran. Rujukan pada penelitian sebelumnya oleh *Rahayu et al.* (2014) dan *Cottalismewati et al.* (2022) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berkontribusi pada kinerja pemerintah daerah.

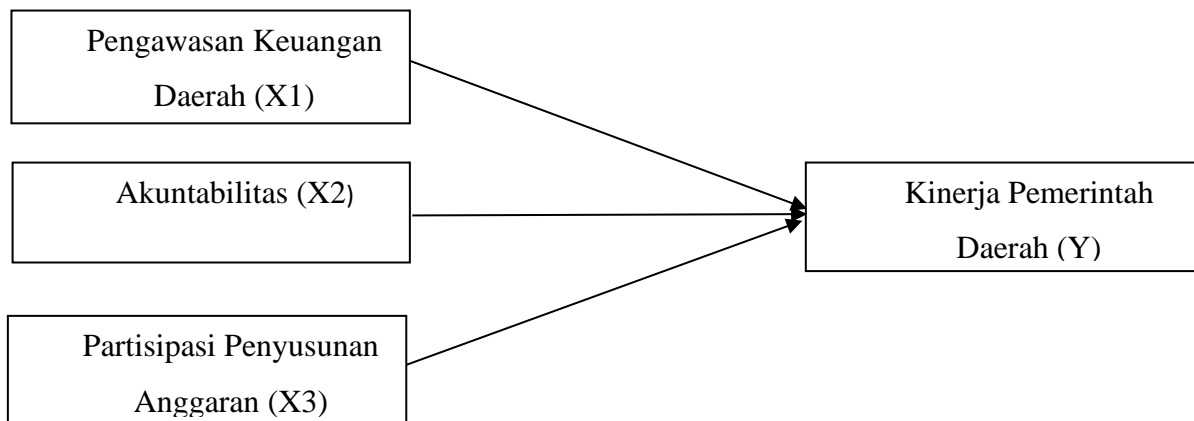
H3: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang permasalahan serta pengembangan hipotesis penelitian “pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)”. Hal ini dapat dilihat dengan kerangka berpikir berikut ini:

Gambar 3.1

Model Kerangka Pemikiran Teoritis dalam Penelitian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah



Kinerja Pemerintah Daerah menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi visi/misi dan tujuan organisasi. Penilaian kinerja pemerintah daerah (Y) menggunakan lima indikator, yaitu dalam suatu sistem, terdapat masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dengan total sembilan item pernyataan (Yohana, 2020).

Menurut Alatas, *et al.*, (2022) menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah beroperasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Indikator dalam variabel pengawasan keuangan daerah (X1) ada 4 yaitu: akurat, tepat waktu, perspektif dan operasional dan fleksibel dengan 5 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Menurut Poae dan Saerangi (2013: 29), akuntabilitas berarti tanggung jawab baik orang atau badan yang dipilih atas pilihan dan tindakan mereka. Indikator dalam variabel akuntabilitas (X2) ada 4 yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dengan 6 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Didalam penyusunan anggaran, partisipasi dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik salah saji, kecurangan dan yang lainnya dimana yang melibatkan individu-individu secara langsung yang sesuai dengan bidangnya. Indikator dalam partisipasi penyusunan daerah (X3) ada 4 yaitu: keikutsertaan, kepuasan, besarnya pengaruh, dan kebutuhan berpendapat dengan 8 item pernyataan (Kristiastanti, 2018). Dalam variabel partisipasi penyusunan anggaran ini menggunakan 8 pernyataan dengan 6 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif, yakni pada pernyataan X3.7 dan X3.8. Sehingga menggunakan konversi nilai dalam tabulasi data. Responden

yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) itu hasilnya 5, Sangat Setuju (SS) hasilnya 4, Netral hasilnya tetap 3, Setuju (S) hasilnya 2, dan Sangat Setuju (SS) hasilnya 1, dan sebaliknya.

Populasi dalam penelitian ini penulis mengambil Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan sejumlah 6.134 yang tersebar di 30 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu *Purposive Sampling*. Sugiyono (2015: 67) menyatakan Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan 2. Kasubag Keuangan., Kasubag Umum serta Kasubag Perencanaan, 3. Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tabel 1. Data Kriteria Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah Populasi	6.134
Jumlah sampel yang tidak masuk kriteria sampel	(5.957)
Jumlah Sampel yang diperoleh	177

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tabanan (2023)

Penelitian ini dalam pengolahan data dan menganalisis data dengan beberapa tahapan penelitian, yakni:

1. Analisis Statistik Deskriptif dipakai agar mengetahui keadaan data baik dilihat dari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasinya.
2. Uji Instrumen dalam penelitian ini adalah Uji Validitas yaitu diukur dari nilai koefisien korelasinya diatas 0,3 maka item pernyataan dikatakan valid dan Uji Reliabilitas *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 maka instrumen yang digunakan reliabel dengan menggunakan rumus alpha.
3. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memverifikasi bahwa distribusi data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan tidak mengandung nilai yang ekstrim (outlier).
4. Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Ket: Y = Kinerja Pemerintah Daerah, α = konstanta, β = Koefisien regresi, X1 = Pengawasan Keuangan Daerah, X2 = Akuntabilitas, X3 = Partisipasi Penyusunan Anggaran, e = Standar *error*.

5. Kelayakan model penelitian dapat dievaluasi melalui Uji Determinasi, Uji F, dan Uji t, dengan nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengawasan	177	15.00	25.00	21.6554	2.26131
Akuntabilitas	177	18.00	30.00	26.8757	2.67274
Partisipasi	177	23.00	40.00	30.3051	3.53837
Kinerja	177	27.00	45.00	40.0508	3.73143
<i>Valid N (listwise)</i>	177				

Sumber: Data diolah(2023)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa nilai yang valid adalah 177. Data Pengawasan Keuangan Daerah (X1) dengan nilai minimum yaitu 15.00, kemudian maksimum nilainya 25.00, untuk rata-rata nilainya 21.6554 serta standar deviasinya 2.26131. Data Akuntabilitas (X2) dengan nilai minimum yaitu 18.00, maksimum nilainya 30.00, untuk nilai rata-ratanya 26.8757 serta standar deviasinya 2.67274. Data Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) dengan nilai minimum yaitu 23.00, maksimum nilainya 40.00, rata-rata nilainya 30.3051, serta standar deviasinya 3.53837. Data Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai minimum yaitu 27.00, kemudian maksimum nilainya 45.00, rata-rata nilainya 40.0508, serta standar deviasinya 3.73143.

Tabel 4.3. Uji Instrumen

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,855	Valid	0,931	Reliabel
X2	0,796	Valid	0,916	Reliabel
X3	0,587	Valid	0,701	Reliabel
Y	0,717	Valid	0,927	Reliabel

Sumber: Data diolah(2023)

Tabel 4.5. Uji Hipotesis

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	18.281	5.633	.000	
Pengawas (PW)	.105	.163	.500	Tidak Signifikan
Akuntabilitas (AK)	.228	2.725	.006	Signifikan
Partisipasi Penyusunan Anggaran (PP)	.441	6.246	.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.226			
F Statistik	18.172			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Kinerja Pemerintah Daerah			

Sumber: Data diolah(2023)

Berdasarkan pada tabel di atas, fungsi regresi dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pemerintah Daerah} = 18.281 + 0.105PW + 0.228AK + 0.441PP + e$$

Dari persamaan yang ada, jika semua variabel independen tidak memiliki nilai, oleh sebab itu besarnya Kinerja Pemerintah Daerah adalah 18.281. Nilai beta masing-masing variabel mempunyai signifikansi yaitu setiap kenaikan 1 basis point variabel independen yaitu bisa meningkat sesuai dengan nilai *standardized Beta*.

Tabel 4.6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	.240	.226	3.28189

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Pengawasan, Akuntabilitas

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,226 atau 22,6% variasi nilai Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dalam faktor-faktor Pengawas Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 77,4% di pengaruhi dengan faktor lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

Tabel 4.7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	587.192	3	195.731	18.172	.000 ^b
	Residual	1863.350	173	10.771		
	Total	2450.542	176			

- a. *Dependent Variable:* Kinerja
 b. *Predictors:* (Constant), Partisipasi, Pengawasan, Akuntabilitas

Hasil Uji *P-value* menunjukkan bahwa nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka Pengawas Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.8. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.281	3.246		5.633	.000
	Pengawasan	.105	.155	.064	.676	.500
	Akuntabilitas	.228	.132	.163	2.725	.006
	Partisipasi	.441	.071	.418	6.246	.000

- a. *Dependent Variable:* Kinerja

Variabel Pengawas Keuangan Daerah memiliki koefisien positif yaitu 0,064, nilai signifikasinya sebesar 0,500 > 0,05, menunjukkan bahwa Pengawas Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis 1 pada penelitian ini ditolak.

Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien positif dari Variabel Akuntabilitas yang bernilai 0,163 dan nilai signifikasinya sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Hipotesis 2 dalam penelitian ini dapat diterima.

Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki koefisien positif yaitu 0,418, nilai signifikasinya sebesar 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis 3 pada penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil analisis serta hal yang dibahas yangmana telah diuraikan, dapat dikemukakan simpulan berikut:

1. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti Pengawasan Keuangan Daerah tidak memiliki peran terhadap meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Jika dilihat dari pengertian Pengawasan Keuangan Daerah, yaitu segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah khususnya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan perlu meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah dan melaksanakan program pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Kinerja Pemda dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini, menunjukkan Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan telah menerapkan dan mengimplementasikan akuntabilitas dengan baik dari segi laporan keuangan dan kinerja pegawai baik individu/organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disepakati serta para pegawai sudah terlibat dan berpartisipasi sebagaimana mestinya dalam penyusunan anggaran sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Saran

Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan
Diharapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah baik dari pimpinan, sub bagian, serta pegawai lainnya baik dengan program pelatihan dan melakukan pengkajian ulang terkait dengan Pengawasan Keuangan Daerah dan sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta meningkatkan dan mengaktifkan Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sehingga Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan optimal.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan uji R pada penelitian ini, bahwa terdapat 77,4% yang

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2011. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jatmiko, Bambang.2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Volume 7.Issue 2.

Jitmau, Fanny Kalangi, Lintje Lambey, Linda.2017.Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong).Universitas Sam Ratulangi.

Kedepatian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial.

Kristiastanti, E.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten).

Kuswandi, Aos.2016.Manajemen Pemerintahan Daerah.Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam ‘45’ (UNISMA).

Lilis Saidah Napisah, Cecep Taufiqurachman.2020.Model Pengolahan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Badung.STIE Ekuitas Bandung.Volume 6 No 2 Juli 2020.

Mahsun,Mohamad.2009.Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Edisi 1.Yogyakarta BPFE , Yogyakarta.

Meiryani.2021.Memahami Analisis Regresi Linear Berganda.Jakarta Indonesia., diakses tanggal 24 Juni 2022.

[https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20\(Ghozali%2C%202018\)](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20(Ghozali%2C%202018))

Morad, Ayuwandira M et al.,.2022.Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.Volume 4, Nomor 1, Juni 2022. E-ISSN: 2685-0915 , P-ISSN: 2685-080X.

Nurchayani, Kunwawiyah.2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening.Uninersitas Diponegoro Semarang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poe, Dedy Aries, Saerang, David P.E.2013.Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan K euangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud.Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.

Purnama, Fifit, Nadirsyah, Dan.2016.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya.Universitas Syiah Kuala. Vol 1, No 2, (2016) Halaman 01-15.

Putra, C.Y.M.2022.Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, diakses tanggal 11 Januari 2022 jam 17.50 WIB.

Putra, Putu Deddy Samtika, Indraswarawati, Sang Ayu Putu Arie.2021.Pengaruh Pengawasn Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kelungkung.Universitas Hindu Indonesia.

Pratama,, I.R.2022. Kasus DID Tabanan, KPK Periksa Direktur Eksekutif Pusaka Negara dan 3 PNS Kemenkeu., diakses tanggal 16 Februari 2022, jam 13.59 WIB.

Rahayu, Ni Luh Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Sinarwa, Ni Kadek.2014.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia. Volume 2 No. 1 Tahun 2014.

Republik Indonesia.2004.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Riana Mayasari.2021.Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya. Deepublish.ISBN: 978-623-02-3658-7.

Sari, Putri Kartika.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisaasi Perangkat Daerah Kota Magelang).Universitas Muhammadiyah. Magelang.

Sugiyono.2018.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi.2022., diakses tanggal 24 Juni 2022.

Warisman, Kika Sakinah Wulandari, Endang.2022.Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021.E-ISSN : 2829-2006.

Wiguna, Budi Sastra, Yuniartha, Gede Adi Ari, Nyoman Darmawan, Surya.2015.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.Universitas Pendidikan Ganesha.Singaraja, Indonesia. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.

Yohana, V.B.2020.Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance (Tata kelola Pemerintahan yang baik) (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan).